

**1.000 Ha ..... Sambungan hal 1**

yang kesulitan air semakin banyak. Ada 17.753 KK terdiri dari 63.233 jiwa sudah meminta bantuan air. Jumlah tersebut yang datanya masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul. Sementara 10 kapanewon yang mendapat otoritas menangani kekeringan sendiri sudah mengirim bantuan air sejak awal bulan Juli ini. Seperti di Kecamatan Tepus sudah mengirimkan bantuan air ke masyarakat sebanyak 269 tangki ke lima kalurahan, masing-masing Tepus,

Purwodadi, Giripanggung Sidoarjo dan Sumberwungu. "Ada 5 kalurahan, 26 pedukuhan, 96 Rukun Tangga (RT) 3.226 KK terdiri dari 12.344 jiwa sudah kesulitan air," kata Penewu Kapanewon Tepus Alsito SSos MSI, Senin (27/7). Kapanewon Tepus termasuk mempunyai otoritas untuk mengelola anggaran dropping air. Tahun ini jumlah anggaran sebesar Rp 106.400.000. Dropping ini diprioritaskan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, sementara bagi yang mampu dapat men-

cukupi kebutuhan air dengan membeli kepada pedagang swasta. Di Tepus harga satu tangki air berisi 5.000 liter pedagang swasta sekitar Rp 150 ribu, tergantung jarak tempat pengambilan dengan lokasi dropping dan tingkat kesulitan medan. Semakin jauh jarak dan sulit medannya semakin mahal. Hal senada juga diungkapkan Panewu Kapanewon Ponjong, meskipun daerah ini menyimpan sumber air, tetapi ada wilayah yang kekeringan. (Ira/Ewi/Ria)-d

**Bank BPD ..... Sambungan hal 1**

pengkajian," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di BPD secara virtual, di Jakarta, Senin (27/7).

Turut menyaksikan penandatanganan ini Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Dewan Komisier Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Dikatakan Menkeu, penempatan dana ini merupakan lanjutan dari penempatan dana Pemerintah se-

belumnya di empat bank BUMN yakni BRI, Mandiri, BNI dan BTN sebesar Rp 30 triliun. Diharapkan dengan penempatan dana ini, BPD akan lebih gencar menyalurkan kredit kepada masyarakat di daerah, seta mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk turut serta dalam menyalurkan kredit ke masyarakat.

Pemerintah memberikan pinjaman dana kepada Pemda yang mengalami penurunan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pandemi Covid-19. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pertama kalinya Pemerintah Pusat memberikan pinjaman kepada Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Jawa

Barat. Penyaluran pinjaman dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Untuk program ini Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp 12,5 triliun yang terdiri Rp 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan Rp 8 triliun untuk 2021. Sementara Pemprov Jabar mengajukan pinjaman Rp 4 triliun yang terdiri Rp 1,9 triliun di 2020 dan Rp 2,09 triliun di 2021.

Adapun jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun. Karena dana dari Bank Indonesia itu jangka waktunya lima sampai tujuh tahun, kalau sampai 10 tahun artinya Pemerintah Pusat menanggung waktu lebih lama tiga tahun. (Lmg/Ira/Ria)-a

**Pernikahan ..... Sambungan hal 1**

Kedua, dispensasi nikah di pengadilan agama ternyata tidak selalu dikarenakan hamil duluan. Data di portal online PA menunjukkan bahwa hamil duluan menjadi salah satu penyebab pengajuan dispensasi nikah. Namun ada faktor lain sebagai ikutan, yakni putus bahkan tidak sekolah formal sama sekali, lalu merasa sudah memiliki calon pasangan yang menunggu untuk menikah.

Namun di beberapa pelosok desa yang minim akses, ekonomi lambat berputar, jauh dari informasi kesehatan reproduksi, maka nikah usia 16-18 tahun dianggap lumrah. Bahkan sebagian orangtua di desa begitu gembiranya memiliki anak perempuan yang dilamar pada usia muda. 'Anakku wis

payu' begitu seolah menyentakkan anak dilamar dengan barang dagangan.

Tentu berkebalikan dengan anak-anak perempuan yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi (setara D3-S1), yang jumlahnya hanya 7% - 8% persen dari penduduk Indonesia. Inginnya selesai kuliah, baru menikah. Di kota, menunda pernikahan karena sekolah, dianggap baik. Tapi di desa, menikah muda pun dianggap baik, karena menyelamatkan ekonomi dan seksualitas.

Ketiga, tingkat ekonomi, pendidikan, dan akses pada informasi kesehatan para orangtua, ternyata terkait erat dengan izin dalam keluarga untuk pernikahan. Orangtua dengan tingkat

ekonomi baik, pendidikan tinggi, dan well informed, relatif memberikan penguatan pada anaknya untuk menyelesaikan sekolah, kuliah, atau bekerja dulu. Untuk bekal pernikahan.

Pertanyaan menarik terkait kehamilan usia anak, adalah, bagaimana anak anak dapat menahan diri untuk tidak melakukan seks aktif sebelum memasuki pernikahan? Ini membutuhkan kerja keras banyak pihak, agar usia anak-anak diisi dengan beragam kegiatan olah fisik, olah intelektual, oleh keterampilan, dan olah spiritual secara optimal.

Gempuran akses smartphone di tangan anak, jika tidak diwaspadai orangtua, dapat mengantarkan anak pada perilaku seks aktif. Be-

**BPD DIY RESMIKAN KANTOR KAS BINANGUN Tingkatkan Layanan Nasabah di Kulonprogo**

**WATES (KR)** - Bupati Kulonprogo Drs Sutedjo berharap keberadaan gedung baru Kantor Kas Binangun Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY di halaman pemkab setempat memberi manfaat lebih untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, khususnya pegawai di area Pemkab Kulonprogo.



KR-Asrul Sani

**Bupati Kulonprogo Sutedjo mencoba mobil ambulans bantuan PT Bank BPD DIY untuk RSUD NAS.**

"Semakin mempermudah dalam memberikan layanan khususnya kepada para pegawai di lingkungan pemkab dan masyarakat umum," katanya saat meresmikan gedung baru Kantor Kas Binangun BPD DIY di Kompleks Pemkab Kulonprogo, Senin (27/7).

Bupati juga mengapresiasi bantuan mobil ambulans dana CSR PT Bank BPD DIY untuk RSUD Nyi Ageng Serang (NAS) seharga Rp 300 juta. Sementara Pemkab Kulonprogo memberikan hibah Pos Satpam untuk Kantor Kas Binangun BPD DIY. "Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan mobil ambulans, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," jelas Sutedjo. Peresmian ditandai dengan pengguntingan buntal (rangkai bunga) oleh Bupati Sutedjo.

Direktur Umum PT Bank BPD DIY, Drs Cahya Widi MM mengatakan Kantor Kas untuk memenuhi pelayanan

pegawai pemkab. "Pembangunan gedung baru kantor kas Binangun bertujuan mendukung operasional pegawai Pemkab Kulonprogo, selain untuk mengembangkan perbankan di lingkungan pemkab," tuturnya.

Menurut Cahya Widi, Bank BPD DIY terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat DIY. Selain itu keberadaan Bank BPD DIY bisa mendukung setiap program pemerintah serta melakukan inovasi produk dan layanan perbankan. Sehingga dapat menjadi bank terpercaya, istimewa dan menjadi pilihan masyarakat.

Bank BPD DIY selalu mendukung program pemerintah dalam menggalakkan transaksi non tunai. Selama ini Bank BPD DIY tiada henti untuk melakukan inovasi. Sejumlah produk digital telah diluncurkan antara lain E-

Warong, E-Retribusi, E-Samsat dan E-Billing. "Pengembangan fitur Mobile Banking sehingga dapat memenuhi kemudahan dan kecepatan dalam transaksi yang saat ini menjadi kebutuhan mutlak masyarakat," tambahnya.

Selain itu Bank BPD DIY juga menjalin aliansi strategis dengan Fintech dan Marketplace juga telah dikembangkan. Sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi Digital Bank BPD DIY dalam bertransaksi dan memasarkan produknya. Bank BPD DIY mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan Digital Bank BPD DIY. Sebagai bank yang dipercaya untuk mengelola Keuangan Daerah, Bank BPD DIY senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. (Rul/Aha)-d

**Sindikatis ..... Sambungan hal 1**

Berdasarkan pemeriksaan, para tersangka mengatakan, pemessannya adalah pemilik kendaraan bermesalah angsuran dengan perusahaan pembiayaan. "Para pemesan merupakan pemilik kendaraan yang menunggak angsuran. Mereka menghindari penagih utang. Mereka juga menggunakan STNK palsu ini agar lolos razia kepolisian," jelasnya.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, seperti perangkat komputer, stempel kepolisian dan kantor pajak serta gulungan hologram. Atas perbuatannya, kedua ter-

sangka dijerat pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 jo pasal 55 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman lebih dari lima tahun penjara.

Tersangka GNY mengatakan, sebagian pesan adalah pemilik kendaraan roda empat yang berasal dari kota-kota di seluruh Indonesia. Menurut pengakuannya, mahar pembuatan satu STNK palsu Rp 3 juta.

"Sepekan bisa bikin beberapa STNK palsu. Saya hanya menerima pesanan, tidak menawarkan," ujarnya. (Lim)-a

**Suhu ..... Sambungan hal 1**

Pergerakan angin Monsoon Australia memberikan dampak berupa musim kemarau di wilayah tersebut. Suhu dingin dan kering bakal dirasakan masyarakat Yogya selama musim kemarau berlangsung.

"Sebagai informasi, periode musim kemarau di DIY masih berlangsung hingga Oktober. Dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus," jelasnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Etik Setyaningrum meminta masyarakat tetap memperhatikan kesehatan. Begitu pula para petani juga diminta menjaga pola dan jenis tanaman yang sesuai dengan iklim kemarau (menghindari gagal panen).

la mengungkapkan, suhu yang cukup dingin pada malam hari yang dirasakan masyarakat DIY merupakan salah satu karakteristik dari musim kemarau. (Ria)-a

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**  
Mengucapkan  
**Selamat Hari Jadi ke 216 KABUPATEN KLATEN**

**PIMPINAN DPRD KLATEN**

**"MULIA" AUTHORIZED MONEY CHANGER**  
www.muliamoneychanger.co.id

**PERUBAHAN JAM OPERASIONAL MASA PANDEMI COVID - 19**

- GRAND INNA MALIOBORO HOTEL JL.MALIOBORO 60 YOGYAKARTA  
TELP : 0274 - 547 688 DAN 563314  
BUKA : 08.00 - 17.00 WIB
- PLAZA AMBARRUKMO LOWER GROUND  
TELP : 4331272  
BUKA : 11.00 - 17.00 WIB
- JL. MARGO UTOMO NO. 53, (MANGKUBUMI) YOGYAKARTA  
TELP : 0274 - 5015000  
BUKA : 08.00 - 16.00 WIB

**TANGGAL 27/Jul/20**

CURRENCIES	BELI	JUAL
USD	14.550	14.800
EURO	16.950	17.200
AUD	10.350	10.600
GBP	18.600	19.000
CHF	15.750	16.150
SGD	10.450	10.750
JPY	136,50	140,50
MYR	3.335	3.535
SAR	3.600	3.950
YUAN	2.025	2.175

Catatan : Kurs sewaktu - waktu dapat berubah  
Menerima hampir semua mata uang asing



**Prakiraan Cuaca Selasa, 28 Juli 2020**

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	23-31	65-95
Sleman	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	23-31	65-95
Wates	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	23-31	65-95
Wonosari	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	23-31	65-95
Yogyakarta	[Sun]	[Sun]	[Sun]	[Sun]	23-31	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir  
Grafis: Arko

**Magang Berfaedah di Instansi Pemerintah**

**Ferri Wicaksono, SIP MA**  
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ekonomi dan Sosial  
Universitas AMIKOM Yogyakarta

Magang sejatinya menjadi satu kesempatan besar untuk memastikan arah karir kita sedini mungkin. Magang cukup populer dikalangan mahasiswa Indonesia karena memang telah banyak perguruan tinggi yang memasukkan kewajiban magang sebagai salah satu prasyarat kelulusan. Pertanyaannya, apakah kita magang hanya untuk memenuhi prasyarat kelulusan? Jika jawaban "ya", maka kita harus buru-buru mengubah mindset kita. Kita boleh menganut paham profit oriented, namun profit tidak selalu berwujud

uang ataupun gaji. Ketika kita memilih melamar sebagai peserta magang, bukan lowongan pegawai tetap, memang kita belum memperoleh kejelasan gaji, status kepegawaian, ataupun jenjang karir.

Jika kita melihat definisi magang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, magang merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Menguasai keterampilan ataupun keahlian tertentu menjadi capaian utama yang harus didapatkan dari kegiatan magang. Hak yang jelas kita dapatkan sebagai peserta magang hanya 1 (satu) yakni diperbolehkan belajar bekerja. Namun tanpa disadari peluang kita tetap sama dengan pegawai tetap, kita memiliki peluang untuk perform tanpa harus melalui tahapan seleksi ketat sebagaimana pegawai tetap. Tentunya ini profit paling menarik

bagi kita peserta magang. Perlu diperhatikan kinerja kita tetap dapat mempengaruhi performa instansi.

Saat ini banyak instansi pemerintah yang membuka peluang magang mahasiswa. Perlu kita pahami di awal bahwa instansi pemerintah merupakan lembaga yang sengaja dibentuk akibat dari produk hukum negara, utamanya peraturan undang-undang. Sehingga operasional instansi pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang melandasi. Beberapa hal yang menjadi kekhasan instansi pemerintah, diantaranya: lingkup pekerjaan, prosedur layanan, cara berpakaian pegawai, jam kerja pegawai, ketentuan gaji dan sebagainya, segala sesuatunya sesuai aturan hukum. Sehingga jika kita ingin magang di instansi pemerintah tentunya kita wajib mengikuti kekhasan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar magang berfaedah di instansi pemerintah? Hal utama yang penting kita perhatikan sebagai peserta magang yakni *choose strategic*

*Job*. Pandemi Covid-19 semakin menuntut kita untuk memiliki *new initiative* dan *new skills*. Apalagi di sisi "pembatasan sosial" yang dimunculkan dalam menyoong situasi new normal akibat pandemi Covid-19 membuat segala aktivitas kerja saat ini diutamakan dalam platform daring. Penting untuk kita melihat peluang ini. Kita hanya akan tampak biasa saja jika kita mampu menyelesaikan pekerjaan yang sudah bisa diselesaikan para pegawai di tempat kita magang, namun kita akan tampak luar biasa jika kita mampu menyelesaikan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan oleh para pegawai tersebut. Kita perlu membuat diri kita "mampu". Kita tidak bisa menunggu diminta mengerjakan sesuatu, namun kita bisa menginisiasi sebuah pekerjaan yang mampu mendukung program prioritas instansi. Kita harus bekerja keras untuk belajar menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baru, bahkan pekerjaan yang dianggap rumit.

Instansi pemerintah sangat erat

kaitannya dalam rangka menyukseskan prioritas pembangunan, baik nasional maupun daerah. Sangat penting pada saat kita melamar magang di sebuah instansi pemerintah, kita menanyakan program yang menjadi prioritas instansi tersebut. Selanjutnya kita akan memposisikan diri kita sebisa mungkin turut membantu menjalankan program tersebut. Optimalisasi program berbasis pemanfaatan teknologi, pengembangan ekonomi kreatif, menjadi gambaran topik yang saat ini sedang diprioritaskan dalam program pembangunan.

Kebiasaan rutin yang perlu kita perhatikan ketika magang di instansi pemerintah tentunya harus menyelesaikan bagaimana kekhasan yang sudah kita bahas di atas, diantaranya: 1). Tepat waktu. Kita perlu berupaya ketepatan waktu kehadiran dan ketepatan waktu penyampaian hasil pekerjaan. 2). Cara berpakaian. Kita perlu menyesuaikan ketentuan pakaian maupun atribut yang wajib yang harus dikenakan. 3). Alur penyampaian pekerjaan.

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**  
Creative Economy Park

Kita harus memperhatikan pertanyaan jawaban hasil pekerjaan kita perlu kita sampaikan kepada pejabat atau staf pada suatu bagian yang memang menangani topik pekerjaan tersebut, sehingga tindak lanjut hasil kerja kita akan lebih terarah.

Selanjutnya kita perlu mendukung dengan menata ulang kepribadian kita. Dimulai dari menata mindset kita, bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang disebut remeh temeh. Apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus menyelesaikan penuh tanggung jawab. Kita juga perlu menjadi pribadi yang komunikatif. Intensitas kita menyapa dan membuka obrolan ringan terhadap para pegawai di instansi magang seolah hal sepele namun itu akan sangat penting. Ibarat iklan di tv, semakin sering muncul maka akan semakin diingat. Kita harus mampu membuat orang-orang di lingkungan kerja kita sering melihat, mengingat dan membicarakan tentang kita. \*\*\*